

# Model Kematangan e-Government Berdasarkan SPBE Menpan Tahun 2018

ENDANG AMALIA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Widyatama  
Email: [endang.amalia@widyatama.ac.id](mailto:endang.amalia@widyatama.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kematangan yang dicapai dan memberikan saran bagi implementasi domain layanan E-Government di RSUD Jampang Kulon Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemetaan SPBE MENPAN Tahun 2018 pada penelitian ini menghasilkan 3 domain, 7 aspek, 35 indikator yang akan digunakan sebagai penilaian kematangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi maturitas SPBE dalam pelayanan publik di Kecamatan memperoleh kategori "Kurang" dengan rata-rata nilai indeks dibawah 2. Oleh karena itu, perlu diberikan rekomendasi dan strategi perbaikan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE.*

**Kata kunci:** E-Government, Jawa Barat, Kematangan, MENPAN, RSUD Jampang Kulon.

## ABSTRACT

*This study was conducted to determine the maturity achieved and provide suggestions for the implementation of the E-Government service domain at the Jampang Kulon Hospital, West Java. Based on the results of the 2018 MENPAN SPBE mapping, this study resulted in 3 domains, 7 aspects, 35 indicators that will be used as an assessment of maturity. The data collection method used is a questionnaire. The results showed that the evaluation of SPBE maturity in public services in the sub-district obtained the "Less" category with an average index value below 2. Therefore, it is necessary to provide recommendations and improvement strategies to increase the SPBE index value.*

**Keywords:** E-Government, RSUD Jampang Kulon, Maturity, MENPAN, SPBE, West Java.

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini, e-Government menjadi isu yang sangat penting terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara elektronik (Nilashi, 2012). Idealnya, pengembangan e-Government diharapkan dapat membantu meningkatkan interaksi antara pemerintah, publik, dan bisnis untuk mendorong perkembangan ekonomi dan politik (Istiyanto & Sutanta, 2012) karena e-Government dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service provider*) dan masyarakat atau pelaku usaha sebagai pengguna pelayanan publik (*public service customer*). Hal ini menyebabkan peran e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik menjadi lebih penting bagi semua pengambil keputusan dalam pemerintahan (Yalia, 2011). Bahkan adopsi e-Government dalam implementasinya telah meningkat di berbagai negara, tetapi pada saat yang sama, kecepatan adopsi e-Government bervariasi dari satu negara ke negara lainnya (Furuholt & Fath, 2008). Jika dilihat lebih dalam sejauh mana implementasi e-Government di negara berkembang khususnya di Indonesia, mayoritas instansi pemerintah di Indonesia masih berada pada tahap kedua (Safitri, 2013), yaitu tahap pematangan 4 tahapan pengembangan e-Government jika mengacu pada model kematangan pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu:

1. Tahap persiapan, berupa keberadaan situs yang memuat informasi dasar yang dibutuhkan publik.
2. Fase pematangan, berupa interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Tahap stabilisasi, berupa transaksi layanan pemerintah secara online.
4. Fase penyebaran, berupa integrasi layanan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha

Tujuan pengembangan e-Government di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan negara. Namun hingga saat ini dapat dikatakan implementasi e-Government di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan dan berjalan lambat (Napitupulu, 2015). Hal ini ditunjukkan lagi dengan kondisi rendahnya tingkat aksesibilitas website pemerintah, dimana menurut penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika (2004) bahwa dari 224 website pemerintah pada tahun 2004, terdapat 10% website yang tidak dapat dibuka. Ditambahkan oleh penelitian Hendriawan (2008) yang melaporkan bahwa dari 402 website di tingkat lokal, terdapat 65 situs yang tidak dapat diakses atau 16% dari total situs yang ada. Bahkan, berdasarkan hasil survei nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa pemeringkatan e-Government di Indonesia (PEGI) tahun 2012, hanya enam pemerintah daerah dari total 497 kabupaten/kota yang dinilai berhasil menerapkan e-Government sedangkan di tingkat provinsi, implementasi e-Government masih mendapat nilai rata-rata kurang (PEGI, 2014).

Dengan kondisi diatas, penulis mengintegrasikan model kematangan e-Government yang dibuat oleh Menpan tahun 2018 dengan nama SPBE untuk menghasilkan model kematangan yang lebih komprehensif dan generik, yang pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan sebagai rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan kematangan e-Government ke tahap yang lebih tinggi

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kematangan e-Government.

Darmawan Napitupulu (2016) dengan judul *e-Government Maturity Model Based on Systematic Review and Meta-Ethnography Approach*. Penelitian ini dilakukan dengan *Systematic Review* dengan pendekatan kualitatif meta-etnografi dengan hasil yang diperoleh adalah model kematangan portal e-Government yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yaitu *web presence*, interaksi, transaksi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, integrasi penuh, dan partisipasi terbuka. Ketujuh tahapan tersebut merupakan sintesa dari 111 konsep kunci yang terkait dengan 25 kajian model kematangan berbasis portal e-Government. Model kematangan yang dihasilkan lebih komprehensif dan generik karena merupakan integrasi dari model-model (*best practice*) yang ada saat ini (Khanra & Joseph, 2019a).

Amsal Djunid et. al (2020) dengan judul *E-Government during the Pandemic: Maturity Assessment of the Provincial and Regency/City Website in West Sumatra*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana data hasil observasi kemudian akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dengan hasil yang diperoleh bahwa situs web pemerintah masih dalam model kematangan tahap 1 dan tahap 2. Sementara itu, website penanganan Covid-19 berada pada tahap 1 (Djunid et al., 2020).

I Made Sukarsa et. Al (2020) dengan judul *Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Dengan hasil penelitian menunjukkan evaluasi kematangan SPBE dalam pelayanan publik di Kecamatan memperoleh kategori "Buruk" dengan total nilai indeks sebesar 1,47 (I Made Sukarsa et al., 2020).

M. Rizeki Yuda Saputra et. Al (2020) dengan judul *Evaluation of Maturity Level of the Electronic based Government System in the Department of Industry and Commerce of Banjar Regency*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan perhitungan indeks domain EBGS Service berdasarkan hasil pengolahan data dari 12 responden pada kuesioner EBGS, kemudian CMMI *Roadmap* dipetakan berdasarkan domain layanan EBGS yang memiliki nilai kesesuaian tertinggi dijadikan sebagai roadmap yang paling sesuai, yang dalam penelitian ini adalah *Process Roadmap* yang kemudian mengukur tingkat kematangan setiap area proses (*Process Area Organizational Process Focus, Process Area Organizational Focus Definition, Process Area Measurement and Analysis, Process Area Causal Analysis and Resolution, Process Area Process and Product Quality Assurance*) (Saputra et al., 2020).

Sohail Raza Chohan et. Al (2020) dengan judul *Synthesizing e-government maturity model: a public value paradigm towards digital Pakistan*. Temuan utama dari penelitian ini adalah pengembangan model kematangan e-gov dengan artefak implementasi dalam tahapan yang diusulkan sebagai berikut: ketersediaan, interaksi, integrasi, transaksi dan partisipasi publik. Keterbatasan/implikasi penelitian Studi ini memberikan kontribusi meta-sintesis kualitatif di bidang model kematangan e-Government dan dapat mendukung peneliti yang mencari pengetahuan dan referensi untuk mengembangkan model kematangan baru untuk negara tertentu mereka dengan menyediakan sumber daya yang berguna untuk penyelidikan dan studi lebih lanjut (Chohan et al., 2020).

Ainhua Year et. Al (2020) dengan judul *Characterization of e-Government adoption in Europe*. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa EGUI+ berkorelasi dengan empat indeks yang disebutkan pada tingkat signifikansi 0,05, karena mayoritas negara

berada pada peringkat yang sama. Hasil berkontribusi untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-Government di Eropa dan tingkat adopsi yang berbeda (Yera et al., 2020).

Josi. P dan Islam S (2021) dengan judul *E-Government Maturity Model for Sustainable E-Government Services from the Perspective of Developing Countries*. Dalam penelitian ini ada lima faktor penentu, yaitu *a detailed process, streamlined services, agile accessibility, use of state-of-the-art technology, and trust and awareness*. Model yang diusulkan divalidasi dengan menggunakan penyelidikan empiris melalui studi kasus dan metode survei (Joshi & Islam, 2018).

Gul Jussupova, et. Al (2019) dengan judul *Digital Government Maturity as a Technologically New E-Government Maturity Model: Experience of Kazakhstan*. Dalam penelitian ini membahas model kematangan e-Government Kazakhstan menggunakan model Gartner, serta masalah dan prospek pengembangan digitalisasi Administrasi Publik di ranah sosial Kazakhstan (Jussupova Gul et al., 2019).

Elena Rytova, et. Al (2020) dengan judul *Assessing the Maturity Level of Saint Petersburg's Digital Government*. Dalam penelitian ini, tingkat kematangan ekonomi digital kota diidentifikasi menggunakan pendekatan fuzzy set. Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun banyak solusi yang ditujukan untuk mengembangkan digitalisasi di sektor publik Rusia dan, khususnya, St. Petersburg, tingkat kedewasaan pemerintah digital kota tetap tidak cukup untuk memenuhi tuntutan modern masyarakat dan bisnis (Rytova et al., 2020).

Sayantan Khanra dan Rojers P. Joseph (2019) dengan judul *E-Governance Maturity Models: A Meta-ethnographic Study*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi kunci yang membentuk ekosistem e-Government yang matang melalui tinjauan sistematis terhadap model kematangan e-Governance yang ada dan pendekatan meta-etnografi (Khanra & Joseph, 2019b).

## **2.2. Konsep Tingkat Kematangan SPBE**

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model-model tingkat kematangan yang telah dipraktikkan secara luas, yaitu:

1. *CMM/CMMI (Capability Maturity Model/CMM Integration)* yang dibangun oleh *Software Engineering Institute (SEI)* merupakan model yang mengukur tingkat kematangan proses pengembangan piranti lunak (Pooja, 2016). Model ini menjadi dasar pengembangan berbagai model kematangan lain seperti tingkat kematangan tata kelola TIK pada *COBIT (Control Objectives for Information Technology)* (ISACA, 2012), arsitektur TIK (*Enterprise Architecture Maturity Model*), manajemen risiko (*Risk Maturity Model*), dan manajemen pengetahuan (*Maturity Model for Knowledge Mangement*).
2. *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis yang dikembangkan oleh banyak pihak antara lain Layne dan Lee (2001) (Layne and Lee, 2001), Andersen dan Henriksen (2006) (Andersen dan Henriksen, 2006), dan Kim dan Grant (2010) (Kim dan Grant, 2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *UN e- Government Survey* (2012) (United-Nation, 2012).

## 2.2. Struktur Penilaian

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. Pemilihan domain, aspek dan indikator disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

**Tabel 1. Domain, Aspek dan Indikator Penilaian (Menpan, 2018)**

<b>Domain 1</b>	<b>Kebijakan Internal SPBE</b>
<b>Aspek 1</b>	<b>Kebijakan Internal tata Kelola SPBE</b>
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
<b>Aspek 2</b>	<b>Kebijakan Internal Layanan SPBE</b>
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>
<b>Aspek 3</b>	<b>Kelembagaan</b>
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
<b>Aspek 4</b>	<b>Strategi dan Perencanaan</b>
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
<b>Aspek 5</b>	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
<b>Domain 3</b>	<b>Layanan SPBE</b>
<b>Aspek 6</b>	<b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja

Indikator 31	Layanan Pengadaan
<b>Aspek 7</b>	<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan Whistle Blowing System
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah

### 2.3. Penilaian Tingkat Kematangan dan Bobot

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

### 2.4 Nilai Indeks

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.

**Tabel 2 Nilai Indeks dan Predikat SPBE**

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Excellent
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif (*mixed*). *Mixed method* artinya menurut Brannen (2005) adalah "Yang dimaksud dengan metode penelitian campuran adalah mengadopsi strategi penelitian yang menggunakan dua jenis metode penelitian.

Pendekatan metode campuran ini dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal sebagai berikut:

1. Observasi lapangan, yaitu penulis melakukan kunjungan ke RSUD Jampang Kulon di Jl. Cibarusah No 1 Tanjung, Jampang Kulon, Sukabumi Regency, Jawa Barat 43178.
2. Wawancara, yaitu penulis menanyakan dan/atau melakukan klarifikasi kepada RSUD Jampang Kulon terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan RSUD Jampang Kulon.
3. Evaluasi dokumen, yaitu penulis melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh RSUD Jampang Kulon.

untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian. Dalam penelitian ini studi kepustakaan diambil dari buku, jurnal, website yang mendukung.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Data tersebut berasal dari data kuantitatif dan kualitatif.

Pada mix method menggunakan desain sequential explanatory, yang menurut Sugiyono (2017), "Merupakan penelitian kombinasi yang memadukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berkesinambungan. Pada tahap pertama menggunakan kuantitatif untuk memperoleh data kuantitatif dan tahap selanjutnya menggunakan kualitatif untuk memperdalam, memperluas, dan menjelaskan data yang telah didapatkan pada tahap awal".

Data yang telah diperoleh selanjutnya di analisis untuk menjawab rumusan masalah. dalam penelitian ini menggunakan Eksplanatif yaitu peneliti memprioritaskan pada pengumpulan data secara kuantitatif terlebih dahulu, baru kemudian data kualitatif.

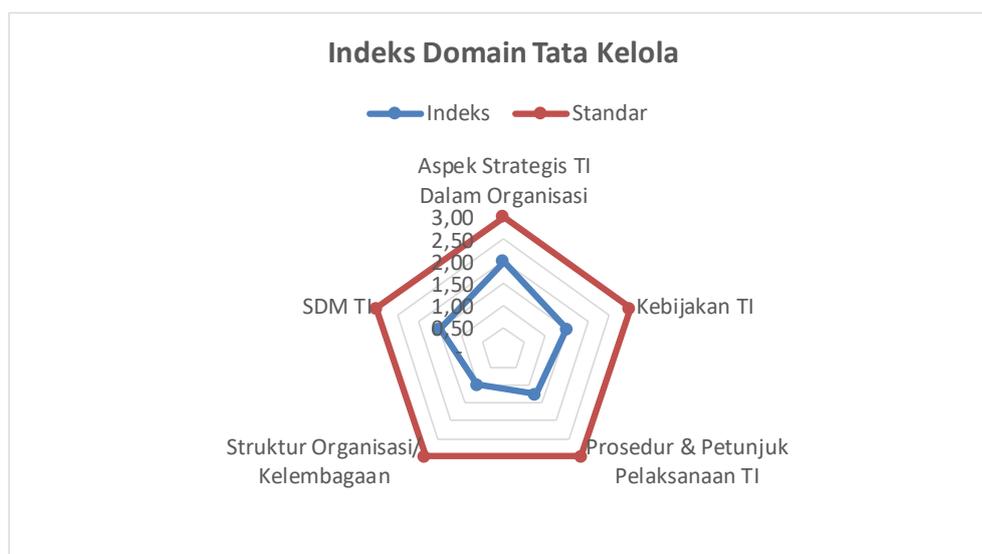
#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Domain Tata Kelola

Berikut hasil observasi dan kuisisioner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk domain tata kelola yang dijabarkan pada tabel 2 dan gambar 1 dibawah ini:

**Tabel 2. Indeks Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Domain Tata Kelola</b>	<b>1,38</b>
<b>Sub Domain</b>	<b>Indeks</b>
Aspeks Strategis TI dalam Organisasi	2,00
Kebijakan TI	1,50
Prosedur & Petunjuk Pelaksanaan TI	1,25
Struktur Organisasi/Kelembagaan	1,00
SDM TI	1,50



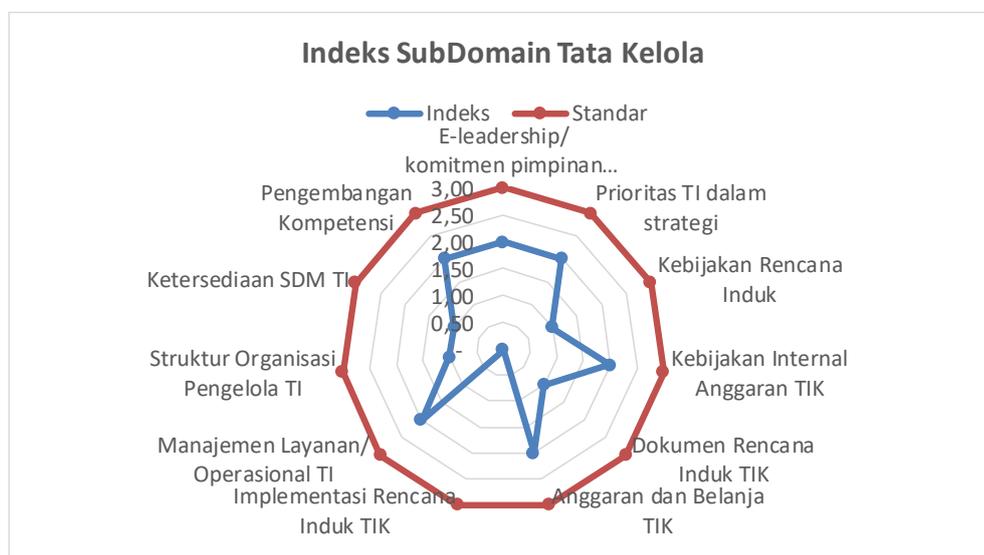
**Gambar 1. Indeks Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon**

Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks Domain Tata kelola Aspek Strategis TI dalam Organisasi memiliki indeks 2 dari 3, Kebijakan TI memiliki indeks 1.50 dari 3, Prosedur & Petunjuk Pelaksanaan TI memiliki indeks 1.25 dari 3, Struktur Organisasi/Kelembagaan memiliki indeks 1.00 dari 3 dan SDM TI 1.50 dari 3. Total Nilai Assessment untuk Domain Tata Kelola adalah 1.38 dari 3, sehingga predikat penilaiannya adalah kurang.

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub-domain tata kelola yang dijabarkan pada tabel 3 dan gambar 2 dibawah ini:

**Tabel 3. Indeks Sub-Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Sub-Domain Tata Kelola</b>	<b>1,38</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
E-leadership/komitmen pimpinan akan TI	2,00
Prioritas TI dalam strategi	2,00
Kebijakan Rencana Induk	1,00
Kebijakan Internal Anggaran TIK	2,00
Dokumen Rencana Induk TIK	1,00
Anggaran dan Belanja TIK	2,00
Implementasi Rencana Induk TIK	-
Manajemen Layanan/Operasional TI	2,00
Struktur Organisasi Pengelola TI	1,00
Ketersediaan SDM TI	1,00
Pengembangan Kompetensi	2,00



**Gambar 2. Indeks Sub-Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon**

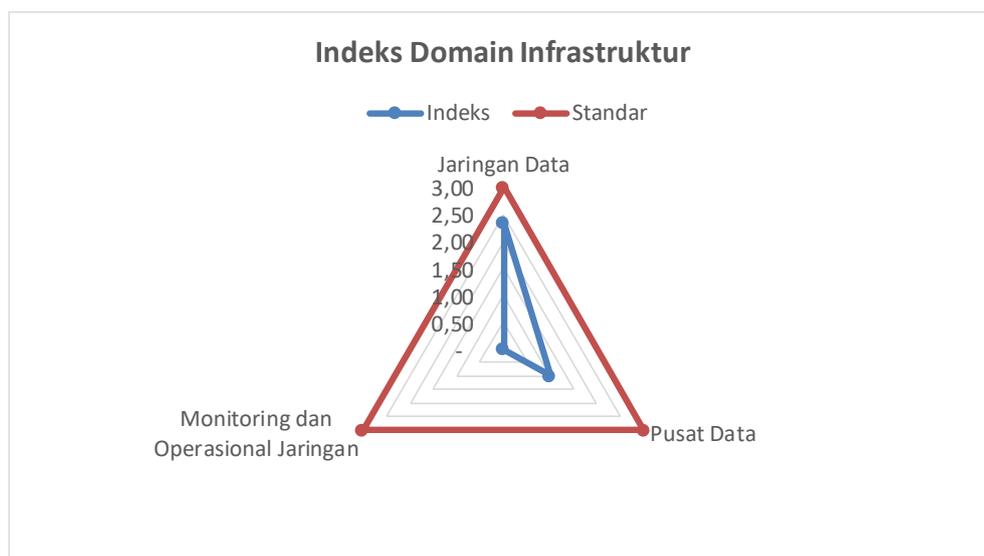
Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks SubDomain Tata kelola memiliki indeks 1.38 dari 3, dengan masing-masing indikator dibawah 2, sehingga predikat penilaian untuk subdomain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dari 3.

2. Domain Infrastruktur

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk domain infrastruktur yang dijabarkan pada tabel 4 dan gambar 3 dibawah ini:

**Tabel 4. Indeks Sub-Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Domain Infrastruktur</b>	<b>1,70</b>
<b>Subdomain</b>	<b>Indeks</b>
Jaringan Data	2,33
Pusat Data	1,00
Monitoring dan Operasional jaringan	-



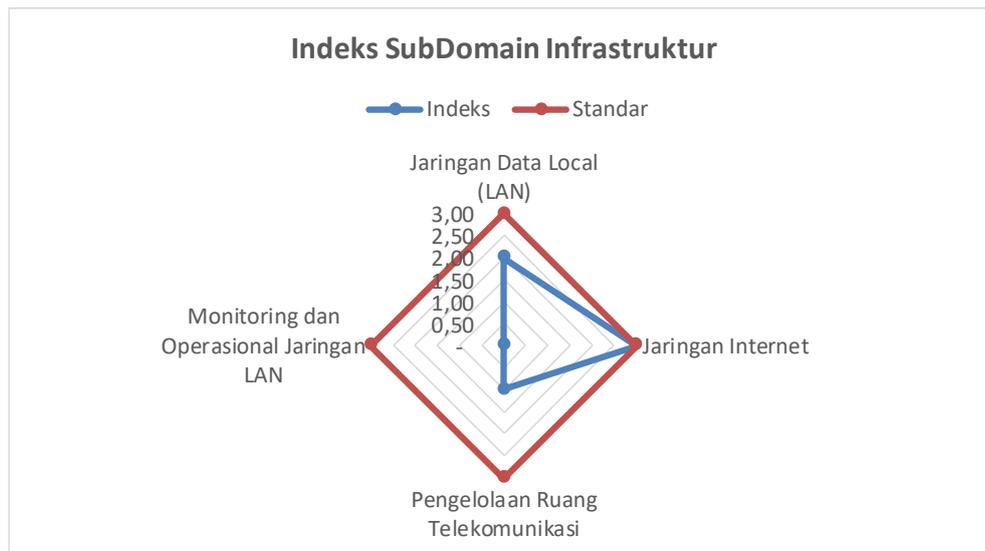
**Gambar 3. Indeks Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon**

Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks Domain Infrastruktur memiliki indeks 1.70 dari 3, dengan masing-masing indikator dibawah 2.5, sehingga predikat penilaian untuk subdomain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub-domain infrastruktur yang dijabarkan pada tabel 5 dan gambar 4 dibawah ini:

**Tabel 5. Indeks Sub-Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Sub-Domain Infrastruktur</b>	<b>1,70</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Jaringan Data Local (LAN)	2,00
Jaringan Internet	3,00
Pengelolaan Ruang Telekomunikasi	1,00
Monitoring dan Operasional Jaringan LAN	-



**Gambar 4. Indeks Sub-Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon**

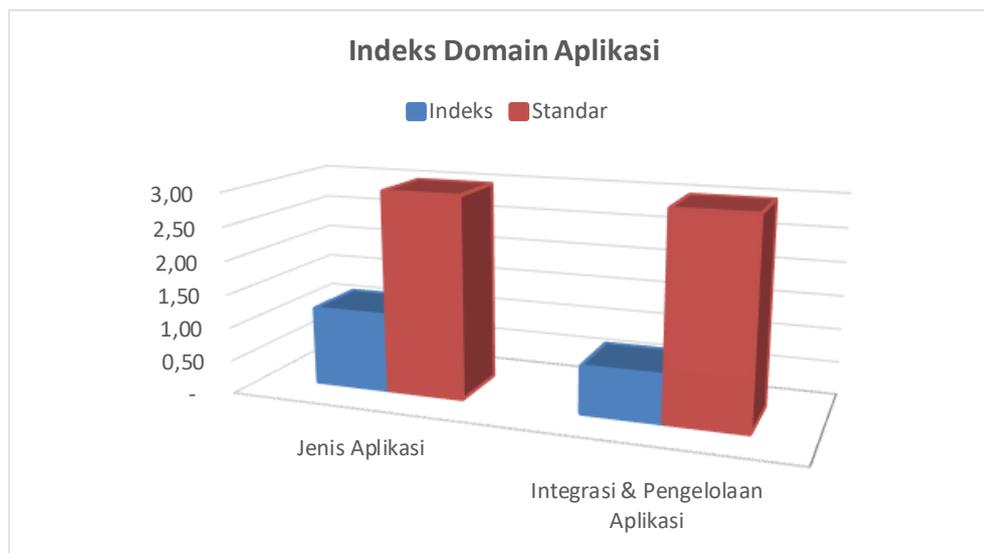
Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks SubDomain Infrastruktur memiliki indeks 1.70 dari 3, dengan masing-masing indikator dibawah 2.5, sehingga predikat penilaian untuk subdomain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

3. Domain Aplikasi

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk domain Aplikasi yang dijabarkan pada tabel 6 dan gambar 5 dibawah ini:

**Tabel 6. Indeks Domain Aplikasi RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Domain Aplikasi</b>	<b>1,08</b>
<b>Aspek</b>	<b>Indeks</b>
Jenis Aplikasi	1,16
Integrasi & Pengelolaan Aplikasi	0,70



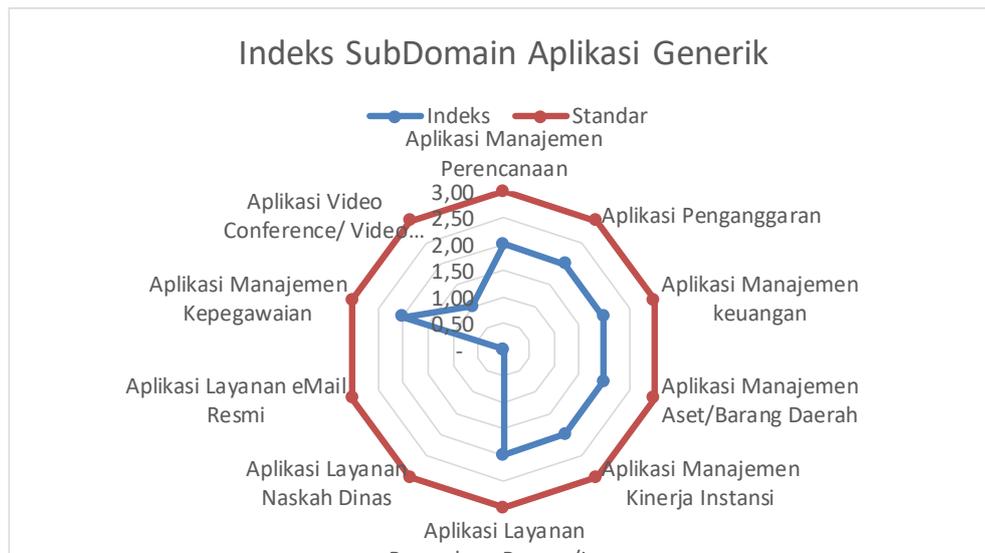
**Gambar 5. Indeks Domain Aplikasi RSUD Jampang Kulon**

Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks Domain Aplikasi memiliki indeks 1.08 dari 3, dengan masing-masing indikator dibawah 1.16, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih sangat jauh dibawah 3.

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub-domain Aplikasi Generik yang dijabarkan pada tabel 7 dan gambar 6 dibawah ini:

**Tabel 7. Indeks Sub-Domain Aplikasi Generik RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Sub-Domain Aplikasi Generik</b>	<b>1,67</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Aplikasi Manajemen Perencanaan	2,00
Aplikasi Penganggaran	2,00
Aplikasi Manajemen Keuangan	2,00
Aplikasi Manajemen Aset/Barang Daerah	2,00
Aplikasi Manajemen Kinerja Instansi	2,00
Aplikasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2,00
Aplikasi Layanan Naskah DInas	-
Aplikasi Layanan eMail Resmi	-
Aplikasi Manajemen Kepegawaian	2,00
Aplikasi Video Conference/Video Meeting	1,0



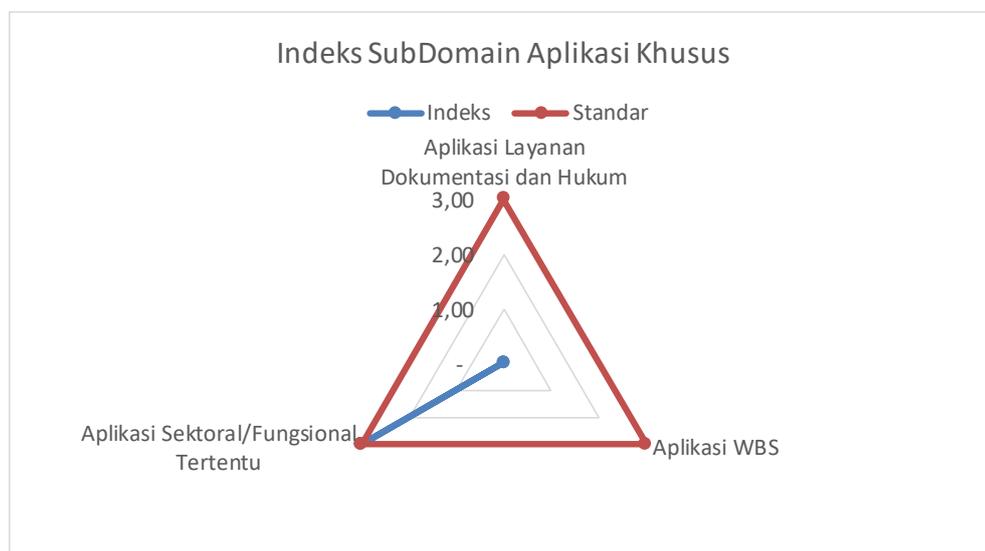
**Gambar 6. Indeks Sub-Domain Aplikasi Generik RSUD Jampang Kulon**

Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks SubDomain Aplikasi Generik memiliki indeks 1.67 dari 3, dengan masing-masing indikator dibawah 2.00, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub-domain Aplikasi Khusus yang dijabarkan pada tabel 8 dan gambar 7 dibawah ini:

**Tabel 8. Indeks Sub-Domain Aplikasi Khusus RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Sub-Domain Aplikasi Khusus</b>	<b>1,62</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Aplikasi Layanan Dokumen dan Hukum	-
Aplikasi WBS	-
Aplikasi Sektoral/FUngsional Tertentu	3,00



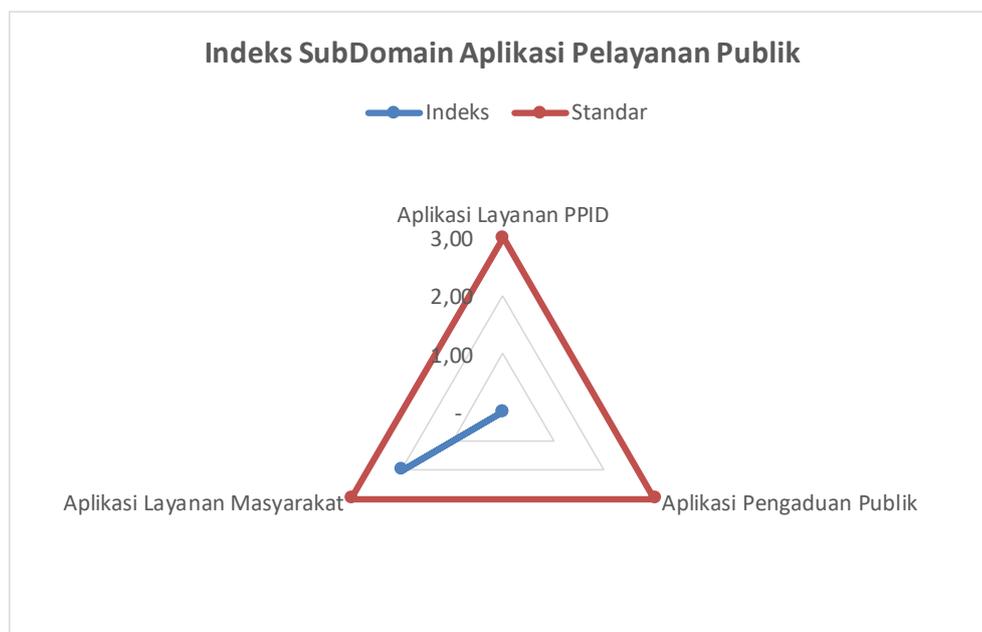
**Gambar 7. Indeks Sub-Domain Aplikasi Khusus RSUD Jampang Kulon**

Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks SubDomain Aplikasi Khusus memiliki indeks 1.62 dari 3, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub-domain Aplikasi Pelayanan Publik yang dijabarkan pada tabel 9 dan gambar 8 dibawah ini:

**Tabel 9. Indeks Sub-Domain Aplikasi Pelayanan Publik RSUD Jampang Kulon**

Indeks Sub-Domain Aplikasi Pelayanan Publik	1,71
Indikator	Indeks
Aplikasi Layanan PPID	-
Aplikasi Pengaduan Publik	-
Aplikasi Layanan Masyarakat	2,00



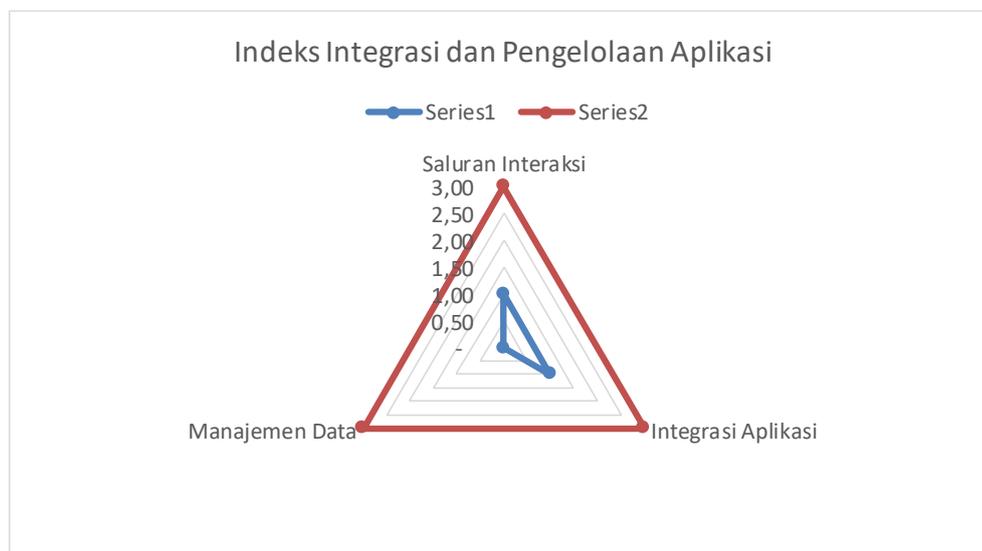
**Gambar 8. Indeks Sub-Domain Aplikasi Pelayanan Publik RSUD Jampang Kulon**

Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks SubDomain Aplikasi Pelayanan Publik memiliki indeks 0.71 dari 3, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk Integrasi & Pengelolaan Aplikasi yang dijabarkan pada tabel 10 dan gambar 9 dibawah ini:

**Tabel 10. Indeks Integrasi & Pengelolaan Aplikasi RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Integrasi &amp; Pengelolaan Aplikasi</b>	<b>0,70</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Saluran Interkasi	1,00
Integrasi Aplikasi	1,00
Manajemen Data	-



**Gambar 9. Indeks Integrasi dan Pengelolaan Aplikasi RSUD Jampang Kulon**

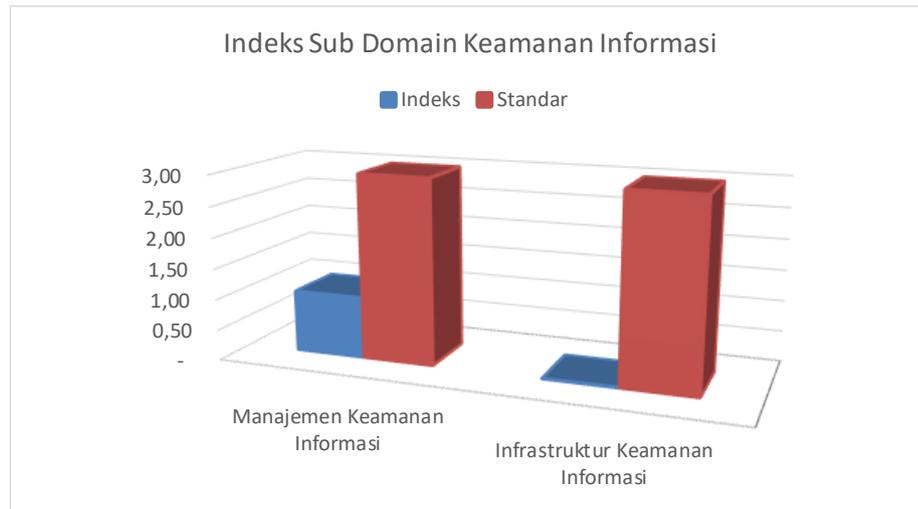
Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks Integrasi dan Pengelolaan Aplikasi memiliki indeks 0.70 dari 3, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

4. Domain Keamanan Informasi

Berikut hasil observasi dan kuisiner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub-domain Keamanan Informasi yang dijabarkan pada tabel 11 dan gambar 10 dibawah ini:

**Tabel 8. Indeks Sub-Domain Keamanan Informasi RSUD Jampang Kulon**

<b>Indeks Sub-Domain Keamanan Informasi</b>	<b>0,50</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Manajemen Keamanan Informasi	1,00
Infrastruktur Keamanan Informasi	-



**Gambar 10. Indeks Sub-Domain Keamanan Informasi RSUD Jampang Kulon**

Gambar diatas menjelaskan bahwa hasil kuisiner pada RSUD Jampang Kulon dengan Indeks SubDomain Keamanan Informasi memiliki indeks 0.50 dari 3, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan nilai hasil assessment Pengukuran Tingkat Kematangan TIK pada RSUD Jampang Kulon yang terdiri dari 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator yang menggunakan SPBE Menpan 2018 bahwa semua domain memiliki rating dibawah 2 (kurang) yang mana indeks tersebut masih jauh untuk dikategorikan sebagai E-Government yang matang (yang memiliki indeks sama dengan diatas 3). Beberapa domain, aspek dan indikator diantaranya ada yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan ada pula yang memang belum lengkap atau standarisasinya tidak ada.

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat memprioritaskan rekomendasi peningkatan tingkat kematangan SPBE berupa perbaikan indikator, rekomendasi tata kelola, dan rekomendasi layanan SPBE.

## DAFTAR RUJUKAN

### Rujukan Buku:

Brannen, Julia. (2005). Memadu Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta:

Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda & Pustaka Pelajar

ISACA. (2012). COBIT 5 Enabling Process. Rolling Meadows: ISACA.

ISACA. (2012). COBIT Framework. Rolling Meadows: ISACA.

ISACA. (2012). COBIT IMPLEMENTATION. Rolling Meadows: ISACA.

ISACA. (2012). COBIT 5 Process-Assessment Model. ISACA.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

**Rujukan Jurnal:**

- Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2006). E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government Information Quarterly*, 23(2), 236–248.
- Chohan et al. (2020). Synthesizing e-government maturity model: a public value paradigm towards digital Pakistan. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(3).
- Djunid et al. (2020). E-Government During the Pandemic: Maturity Assessment of the Provincial and Regency/City Website in West Sumatra. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(2).
- Furuholt, B. & Wahid, F. (2008). E-Government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: The Case of Sragen. In *Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008)* (p. 411).
- Istiyanto, J. & Sutanta, E. (2012). Model Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government. *Jurnal Teknologi Technoscintia*, 4(2), 137-148. Diambil dari <http://technoscintia.akprind.ac.id/techno/media.phpact=journalokabs?1082>.
- I Made Sukarsa et al. (2020). Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*. 4(2).
- Joshi & Islam. (2018). E-Government Maturity Model for Sustainable E-Government Services from the Perspective of Developing Countries. *Sustainability*. 10(6).
- Jussupova Gul et al. (2019). Digital Government Maturity as a Technologically New E-Government Maturity Model: Experience of Kazakhstan. *ICEEG*. 10-14.
- Khanra & Joseph. (2019). E-Governance Maturity Models: A Meta-ethnographic Study. *The International Technology Management Review*. 8(1).
- Kim, D.-Y., & Grant, G. (2010). E-government maturity model using the capability maturity model integration. *Journal of Systems and Information Technology*, 12(3), 230–244.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136.
- Nilashi, M., Bagherifard, K., Ibrahim, O., Janahmadi, N., & Alizadeh, H. (2012). A Multi-Criteria Approach to the Evaluation of Malaysian Government Portal. *Journal Of Theoretical and Applied Information Technology*, 40(2), 194-201.
- Pooja Narayan Patil et al, 2016, CMMI- Its Need in the Industry. *Int J Recent Sci Res*. 7(4), pp. 10418-10421.

- Rytova et al. (2020). Assessing the Maturity Level of Saint Petersburg's Digital Government. *International Journal of Technology*. 11(6).
- Saputra et al. (2020). Evaluation of Maturity Level of the Electronic based Government System in the Department of Industry and Commerce of Banjar Regency. *Journal of Robotics and Control (JRC)*. 1(5).
- United-Nations. (2012). UN E-Government Survey 2012: E-Government for the People.
- Yalia, M. (2011). Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik dengan E-Government. *Buletin Obsevasi*, 9(2), 63-74.
- Yera et al. (2020). Characterization of e-Government adoption in Europe. *PLOS ONE*. 15(4).

**Rujukan Sumber *Online*:**

- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2018: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, <https://spbe.menpan.go.id/>. Download 2020.